

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TERHADAP EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie)

Riska ⁽¹⁾, Ricky Muliawan Hansyar ⁽²⁾ Zulkifli ⁽³⁾

¹²³, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur, Glee Gapui Sigli
e-mail: dedekrisk054@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to determine the Pidie Regency Government's policy on the effectiveness of social assistance. This research employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the implementation of social assistance has generally been effective, as reflected in the distribution of assistance based on applicable regulations, the use of verified beneficiary data, and coordination among the Social Affairs Office, sub-district administrations, and village governments. Factors influencing effectiveness include the accuracy of beneficiary data, inter-agency coordination, the quality of human resources, and administrative management. Meanwhile, the main obstacles include changes in the socio-economic conditions of the community, budget limitations, and the existence of eligible beneficiaries who have not yet been registered. Therefore, improving data accuracy, transparency, monitoring, regular data updates, and institutional coordination is essential to ensure that social assistance is distributed more accurately, fairly, and effectively.

Keywords: Government Policy, Effectiveness, Social Assistance,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten pidie terhadap efektivitas bantuan sosial. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial secara umum telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya penyaluran berdasarkan ketentuan yang berlaku, penggunaan data penerima yang telah diverifikasi, serta koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong. Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi akurasi data penerima, koordinasi antarinstansi, kualitas sumber daya manusia, dan administrasi pelaksanaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria namun belum terdata sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan, transparansi, pengawasan, pembaruan data secara berkala, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, adil, dan efektif.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Efektivitas, Bantuan Sosial,

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia, khususnya di

tingkat daerah. Tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan semata (faktor moneter), kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses mendasar terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan,

modal sosial, hingga standar kelayakan hidup yang bermartabat. Kemiskinan multidimensional ini menuntut pendekatan intervensi yang tidak lagi bersifat parsial, melainkan komprehensif dan berkelanjutan (Telaumbanua dan Lawang, 2024: 15). Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berupaya merumuskan berbagai kebijakan strategis guna menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan mereformasi skema dan penyaluran program perlindungan serta bantuan sosial (bansos).

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, efektivitas pelaksanaan bantuan sosial sering kali menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam hal ketepatan sasaran, transparansi, dan efisiensi distribusi. Kondisi ini juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Sosial.

Permasalahan pertama berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial di Kabupaten Pidie. Dalam implementasinya, masih ditemukan masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima. Hal ini diduga disebabkan oleh data kesejahteraan sosial yang tidak diperbarui secara berkala serta kurang optimalnya proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan bantuan tepat sasaran.

Permasalahan kedua adalah kurangnya transparansi dan sosialisasi kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami kriteria penerima maupun mekanisme penyaluran bantuan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan potensi

konflik sosial. Minimnya informasi yang disampaikan oleh pihak terkait menyebabkan masyarakat merasa proses penentuan penerima tidak adil dan kurang terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam aspek komunikasi publik masih belum optimal dalam mendukung efektivitas program bantuan sosial.

Permasalahan ketiga terkait dengan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam penyaluran bantuan sosial. Proses birokrasi yang panjang serta kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Sosial sering kali menyebabkan bantuan tidak diterima tepat waktu oleh masyarakat. Selain itu, faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah juga menjadi hambatan dalam distribusi bantuan. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara efisien, sehingga memengaruhi tingkat efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Pidie.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Digitalisasi sistem pendataan dan penyaluran bantuan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi program. Namun, implementasi sistem digital juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Permasalahan efektivitas bantuan sosial juga berkaitan erat dengan aspek tata kelola pemerintahan (*good governance*). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya pengawasan yang baik, bantuan sosial rentan terhadap penyimpangan, baik dalam bentuk penyaluran yang tidak tepat maupun potensi penyalahgunaan anggaran. Lebih

lanjut, kebijakan bantuan sosial juga memiliki implikasi terhadap beban fiskal pemerintah. Meskipun bantuan sosial penting dalam menanggulangi kemiskinan, peningkatan anggaran bantuan sosial tanpa diimbangi dengan efektivitas program dapat menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan bantuan sosial yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas program.

Dalam konteks Kabupaten Pidie, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, evaluasi dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, bantuan sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tingkat daerah seperti Kabupaten Pidie sehingga pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Efektivitas Bantuan Sosial (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie)”.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisa lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis. Data dan informasi digambarkan

dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Penelitian *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang kebijakan pemerintah kabupaten pidie terhadap efektivitas bantuan sosial.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data. Berikut ini akan diuraikan pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data primer, adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Data primer tersebut dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
- 2) Data Sekunder, adalah data yang tersedia dan diperoleh di lembaga Pemerintah, organisasi, atau lembaga-lembaga lainya melalui studi pustaka melalui pegumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas kebijakan bantuan sosial merupakan tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program yang bertujuan memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaannya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari aspek ketepatan sasaran, proses penyaluran, koordinasi, transparansi,

maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan sosial secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial Kabupaten Pidie melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dengan mengacu pada data masyarakat yang telah dilakukan verifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perlindungan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pidie diketahui bahwa salah satu aspek penting dalam efektivitas bantuan sosial adalah ketepatan sasaran penerima. Pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya berfokus pada proses pemberian bantuan, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu melalui proses pendataan, verifikasi, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas data penerima manfaat. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang layak menerima bantuan. Apabila data penerima tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan, maka dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.

Selain ketepatan data, efektivitas bantuan sosial juga dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pidie menjalin kerja sama

dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah gampong dalam proses pendataan, verifikasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut menjadi faktor pendukung karena pelaksanaan bantuan sosial tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan. Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menunjukkan bahwa faktor administrasi dan sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan bantuan sosial. Administrasi yang tertib menjadi bagian penting agar proses pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai prosedur. Selain itu, kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan program. Kualitas sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Aparatur yang memiliki kemampuan, pemahaman tugas, serta tanggung jawab yang baik akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Pidie telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pegawai agar mampu mendukung pelaksanaan program bantuan sosial secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Sosial diketahui bahwa efektivitas bantuan sosial tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu bukan hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui program pemberdayaan sosial, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi sehingga secara

bertahap tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.

Dari perspektif masyarakat penerima bantuan sosial, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan sosial memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penerima bantuan menyatakan bahwa bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, terutama ketika kondisi ekonomi mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah memberikan dampak positif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan bantuan sosial. Kendala tersebut antara lain perubahan kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam pelaksanaannya sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam melakukan pendataan, koordinasi, pengawasan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas data penerima, pemerataan bantuan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut memiliki hubungan yang erat dengan

keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Faktor pertama adalah ketepatan data penerima bantuan. Data menjadi dasar utama dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Data yang akurat akan menghasilkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Pidie melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan gampong untuk melakukan pembaruan data sesuai kondisi Masyarakat

Faktor kedua adalah koordinasi antarinstansi. Kerja sama antara Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Koordinasi yang baik dapat mempercepat proses pendataan, verifikasi, serta penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Faktor ketiga adalah sumber daya manusia dan administrasi. Pelaksanaan bantuan sosial membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Administrasi yang tertib juga diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai aturan.

Faktor keempat adalah kondisi ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap bantuan sosial. Masyarakat yang sebelumnya tidak membutuhkan bantuan dapat mengalami perubahan kondisi sehingga membutuhkan perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan data penerima menjadi hal yang sangat penting.

Faktor kelima adalah keterbatasan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor yang menentukan luasnya cakupan penerima bantuan. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat langsung memperoleh bantuan sosial.

Faktor terakhir adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Bantuan sosial dianggap efektif apabila mampu memberikan perubahan positif bagi penerima, seperti membantu memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, yaitu kualitas data, koordinasi

pemerintah, kemampuan aparat, kondisi masyarakat, dukungan anggaran, serta manfaat program bagi penerima. Keberhasilan kebijakan bantuan sosial tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Simpulan dan Saran

Efektivitas kebijakan bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie secara umum telah berjalan cukup baik dalam membantu masyarakat miskin dan rentan miskin. Hal ini terlihat dari upaya penyaluran bantuan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku, penggunaan data penerima yang telah diverifikasi, serta adanya koordinasi dengan pemerintah gampong dan kecamatan untuk memastikan ketepatan sasaran.

Faktor yang memengaruhi efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Pidie yaitu ketepatan data penerima, koordinasi antarinstansi, serta kualitas sumber daya manusia dan administrasi pelaksanaan. Selain itu, faktor penghambat meliputi perubahan kondisi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan masih adanya masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan. Namun, keberhasilan program sangat ditentukan oleh akurasi data, koordinasi, dan dukungan anggaran.

Diharapkan agar Dinas Sosial Kabupaten Pidie terus meningkatkan akurasi pendataan, transparansi, serta pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial agar bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran, adil, dan efektif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendataan, pengawasan, serta transparansi

dalam penyaluran bantuan sosial agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, diperlukan pembaruan data penerima bantuan secara berkala serta peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial, pemerintah gampong, dan masyarakat guna mendukung efektivitas pelaksanaan bantuan sosial di Kabupaten Pidie.

Daftar Pustaka

- Aisyah, D. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2024–2025. *Public Inspiration*, 9(2), 132–142.
- Amalia, N., & Hidayat, A. (2022). Dampak Implementasi SIKS-NG terhadap Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen*, 15(2), 105–118.
- Amin, C., dkk. (2024). Efektivitas Bantuan Sosial sebagai Jaring Pengaman Sosial. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(2), 33–48.
- Anggriani, S. (2025). Evaluasi Dampak Bantuan Sosial Menuju Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Riset Sosial Ekonomi*, 3(4), 36–45.
- Azhar (2023). Implementasi Peraturan Bupati Pidie Mengenai Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Afdan
- Rojabi, M. (2025). Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia:

- Perkembangan 2021–2025. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Ahman, H. (2024). Pengantar Teori dan Praktik Kebijakan Publik Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bachtiar, A. (2021). Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Garis Kemiskinan dan Indikator Sosial Ekonomi Rumah Tangga. Jakarta: BPS.
- Kementerian Sosial RI. (2022). Laporan Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tahun 2022. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Kementerian Sosial RI. (2023). Pedoman Teknis Penetapan Kriteria Penerima Bantuan Sosial. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial.
- Kementerian Sosial RI. (2024). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis DTKS/DTSN 2021–2024. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial.
- Midgley, J. (2022). Sistem Kesejahteraan Sosial di Negara Berkembang. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nugroho, R. (2024). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Era Disrupsi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, B. (2023). Tantangan Implementasi Kebijakan Publik di Wilayah 3T. Surabaya: Pustaka Sinar Harapan.
- Sen, A. (2023). Kapabilitas dan Kesejahteraan: Konsep dan Penerapan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, A. G. (2024). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi Praktis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, A. (2022). Evaluasi Dampak Program-Program Perlindungan Sosial di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Susetyo, H. (2024). Bantuan Sosial: Antara Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wahab, S. A. (2025). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, S., & Hidayat, R. (2025). Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Damayanti, D., Stiawati, T., & Arenawati, A. (2025). Program Keluarga Harapan dan Kontribusinya pada Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 8(1), 1–10.
- Fitriani, F., & Nurhayati, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Efektivitas Program Sosial. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 23–35.
- Fitriani & Hidayat (2024). Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie.
- Gunawan, R., Suryani, A., & Kusuma, B. (2023). Pengaruh Sistem Informasi pada Distribusi Bantuan Pangan Non-Tunai. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 18(3), 112–125.
- Mulyadi, dkk. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

- Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie
- Nainggolan, J., Simanjuntak, M., & Ginting, P. (2021). Evaluasi Awal Efektivitas Bantuan Sosial Masa Transisi. *Jurnal Studi Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 109–121.
- Nursahriza. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Kerangka Good Governance. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(4), hlm. 82–91.
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan Efektivitas Program Bantuan Sosial. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592.
- Rahmat & Fajri (2023). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Lansia pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN) / Universitas Iskandar Muda* URL: <https://jurnal.unida.ac.id/index.php/jian>
- Rafsanjani. (2024). Analisis Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Daya Beli dan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 11(2), 1-12.
- Rifki, N., Syifaa, A., Hermawati, P., & Wahdah, N. (2025). Efektivitas Bantuan Sosial sebagai Instrumen Kebijakan Ekonomi. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 215–219.
- Ruth, S. (2024). Evaluasi Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Pengeluaran Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 109–120.
- Sahidul Anam. (2023). Tinjauan Konseptual Efektivitas Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 5(1), 42–57.
- Santoso, B., & Setiawan, A. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 20–35.
- Santoso, D., & Pratama, A. (2022). Sistem Informasi dalam Pengelolaan Program Sosial Berbasis Teknologi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pengembangan Sosial*, 10(4), 200–213.
- Saragi, S., dkk. (2021). Analisis Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 87–99.
- Suryani (2021). Analisis Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Era Pandemi pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie. *Jurnal Serambi Akademica*. URL: <https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademica>
- Syamsu, J. (2025). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial di Era Digital. *Jurnal Artificial Intelligence dan Digital Business*, 4(3), 768–776.
- Telaumbanua, A., & Lawang, R. M. (2024). Konversi Bentuk Kapital untuk Pengentasan Kemiskinan Multidimensional pada Penerima Bantuan Sosial Kewirausahaan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 13-32.
- Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Good Governance. *Socio-Political Communication Review*, 1(5), 1–9.
- Wimmy, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Sosial: Pengaruh Tata Kelola dan Pengawasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(4), 66–79.